

Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan *Stunting* Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan

Lailatus Suhroh

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

lailatus.17040674005@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Indonesia, perlu dilakukan secara merata. Maka pemerintah perlu menekan angka *stunting* yang menjadi salah satu penghambat bonus demografi dan pembangunan di Indonesia. Dibutuhkan suatu program yang mampu menekan kasus ini, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ko'olan bersama kader dan karang taruna yang membentuk layanan antar jemput anggota posyandu melalui program GOPO (gojek posyandu). Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui proses wawancara, dokumentasi dan observasi. Fokus penelitian ini terletak pada peran pemerintah dalam upaya penekanan *stunting* melalui program GOPO. Upaya pemerintah Desa Ko'olan diantaranya yaitu menyediakan sarana dan prasarana seperti pemberian vitamin dan penyediaan poskesdes, alokasi dana desa sebesar Rp.18.000.000 untuk layanan kesehatan, menjalin kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu. Pada bulan oktober sampai dengan desember 2019 terdapat 28 anak usia 0-2 tahun terdaftar dalam formulir posyandu, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pengurus GOPO, pengelolaan anggaran dana desa serta media sosial sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan Pemerintah Desa Ko'olan mampu mengoptimalkan fungsinya dalam menekan kasus *stunting* melalui program GOPO (Gojek Posyandu).

Kata Kunci : Pembangunan berkelanjutan, *stunting*, GOPO (Gojek Posyandu)

Abstract

Sustainable development organized by Indonesia, needs to be done evenly. So the government needs to reduce the *stunting* rate which is one of the obstacles to the demographic bonus and development in Indonesia. A program that is able to suppress this case is needed, such as the one carried out by the Ko'olan Village Government together with cadres and youth organizations who formed a shuttle service for posyandu members through the GOPO program (gojek posyandu). The research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach, through a process of interviewing, documentation and observation. The focus of this research lies in the role of the government in efforts to suppress *stunting* through the GOPO program. The efforts of the Ko'olan Village government include providing facilities and infrastructure such as providing vitamins and providing village health posts, allocating village funds of IDR 18,000,000 for health services, establishing cooperation with regional apparatus organizations, and increasing community participation in posyandu activities. From October to December 2019 there were 28 children aged 0-2 years registered on the posyandu form, the government needs to pay attention to the welfare of GOPO administrators, village fund budget management and social media as a means of information for the community. Through this research, it is hoped that the Ko'olan Village Government will be able to optimize its function in reducing *stunting* cases through the GOPO program (Gojek Posyandu).

Keywords: Sustainable development, *stunting*, GOPO (Gojek Posyandu)

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh suatu negara berkembang khususnya di Indonesia, membutuhkan adanya pemerataan yang tidak hanya terfokus pada infrastruktur dan perekonomian saja, melainkan juga dapat diselenggarakan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan aspek kelayakan hidup masyarakat, yang dapat ditinjau dari segi kesehatan. Dalam proses pelaksanaannya, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu harus mampu membentuk suatu inovasi ataupun program yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan fokus lebih terarah, sehingga nantinya mampu menciptakan pembangunan yang merata tidak hanya dalam segi pembangunan kepentingan pemerintah dan infrastruktur saja, akan tetapi juga turut memperhatikan aspek pendukung lainnya. Pemerintah juga perlu memperhatikan fungsinya sebagaimana yang disampaikan oleh Stiglitz, pemerintah memiliki fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam pengaturan distribusi pendapatan. Sedangkan, fungsi stabilisasi mengarah pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga (Stiglitz dalam Hastuti, 2018: 788)

Selanjutnya, pemerintah melalui fungsi distribusi harus mengupayakan stabilnya pendapatan masyarakat ataupun kelayakan hidupnya dengan cara memperhatikan tingkat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat, terutama bagi kalangan menengah kebawah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Terdapat berbagai upaya yang mampu diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya berdasarkan pada prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional (Mindarti & Juniar, 2019). Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah tidak lain, yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, salah satunya dengan cara mengurangi angka kekurangan gizi di Indonesia. Karena, sampai saat ini masalah kesehatan di Indonesia masih belum terlepas dari adanya masalah

malnutrisi yang merupakan dampak dari keadaan status gizi. *Stunting* adalah salah satu bagian dari adanya keadaan malnutrisi yang erat kaitannya dengan ketidakcukupan gizi dimasa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Hasil Monitoring dan Pemantauan Status Gizi (PSG) di Indonesia, pada tahun 2017 terdapat 29,6% balita yang mengalami *stunting* di Indonesia dengan persentase pendek 2,8%. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, terdapat 30,8% balita yang mengalami *stunting*. Diketahui dari jumlah tersebut, 11,5% pendek dan 19,3% sangat pendek. (Windasari et al., 2020) Selanjutnya, prevalensi *stunting* di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%) dan menduduki peringkat kelima dunia (Mayasari et al., 2018).

Pada umumnya, *stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Sedangkan menurut UNICEF, *stunting* merupakan presentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi dibawah minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dengan standar pertumbuhan anak keluaran *World Health Organization* (Aridiyah et al., 2015). *Stunting* dapat menimbulkan dampak buruk, baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Dalam jangka pendek *stunting* dapat menyebabkan gagalnya pertumbuhan terhadap anak, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. *Stunting* merupakan wujud dari adanya gangguan pertumbuhan pada tubuh, dan apabila hal ini terjadi, maka salah satu organ tubuh yang cepat mengalami resiko adalah otak. Dalam otak terdapat sel-sel saraf yang sangat berkaitan dengan respon anak termasuk dalam melihat, mendengar, dan berpikir selama proses belajar. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari *stunting* adalah menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf serta sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah, yang tentunya berpengaruh pada produktivitas saat dewasa. Anak mengalami *stunting* memiliki potensi tumbuh kembang yang tidak sempurna, kemampuan motorik dan produktivitas yang cukup rendah, serta memiliki resiko untuk menderita penyakit tidak menular (Rahmidini, 2020).

Retardasi pertumbuhan *postnatal* memiliki potensi hubungan terhadap berat badan sekarang dan tekanan darah. Tekanan darah pada orang dewasa memiliki hubungan negatif terhadap berat lahir dan tekanan darah pada masa kanak-kanak memiliki hubungan

terhadap ukuran bayi pada saat dilahirkan (Oktarina & Sudiarti, 2014). Permasalahan *stunting* tidak hanya berdampak pada faktor pertumbuhan dan kesehatan balita saja, namun juga mampu memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing bangsa. *Stunting* juga mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap misi pembangunan suatu daerah ataupun negara, karena secara tidak langsung semakin meningkatnya persentase *stunting* yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan capaian diatas rata-rata memberikan dampak terhadap kerugian negara. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), peningkatan *stunting* mampu menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 0,7% hingga 2% Produk Domestik Bruto (PDB) untuk negara berkembang, sehingga hal ini mampu membawa kerugian sekitar kurang lebih Rp. 300 Triliun akibat adanya kekurangan gizi mikro dan menghambat bonus Demografi di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), jika dibandingkan dengan data *stunting* tahun 2018 yang mencapai angka 30,8 %, jumlah penderita *stunting* mengalami penurunan angka hingga 2,7% pada tahun 2019, walaupun demikian penurunan *stunting* masih tetap tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (Tempo.co, 2019).

Kasus *stunting* juga mulai tersebar ke 12 Daerah, yang dianggap memiliki potensi dan daya saing di Provinsi Jawa Timur, daerah-daerah tersebut diantaranya yaitu Trenggalek, Kediri, Malang, Nganjuk, Lamongan, Probolinggo, Bondowoso, Jember dan 4 daerah lainnya yang terletak di Pulau Madura yakni Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang serta Kabupaten Bangkalan yang dianggap sebagai salah satu daerah dengan kasus *stunting* tertinggi di Provinsi Jawa Timur (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2019). Salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus *stunting* di Kabupaten Bangkalan, disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu tingginya angka pernikahan dini. Selain kurangnya kesiapan mental, minimnya pengaruh lainnya seperti tingkat pendidikan ibu yang rendah, memiliki pegaruh 5,1 kali lebih beresiko melahirkan anak *stunting* dibandingkan dengan ibu yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Ibu yang memiliki pendidikan $\geq$ SMP cenderung memiliki pola asuh yang baik, hal ini dapat terjadi karena besarnya peluang dalam mengakses informasi lebih besar sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Fatonah et al., 2020). Selain faktor pendidikan dan kasus pernikahan dini, persentase kemiskinan di Kabupaten Bangkalan juga turut mendukung rendahnya kualitas hidup masyarakat yang

berdampak terhadap meningkatnya masalah *stunting* di Kabupaten Bangkalan, hal ini dapat dibuktikan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur.

Tabel 1. Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan

Tahun	Nasional		Provinsi Jawa Timur		Kabupaten Bangkalan	
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%
2014	27.727.780	10,96	4.748.420	12,28	212.200	22,38
2015	28.513.570	11,15	4.775.470	12,34	216.230	22,57
2016	27.764.320	10,70	5.638.530	12,05	205.710	21,41
2017	26.582.990	10,12	4.405.270	11,77	206.530	21,32
2018	25.674.580	9,66	4.292.150	10,98	191.330	19,59

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Tahun 2011-2019, Kabupaten Bangkalan menduduki posisi kedua sebagai wilayah tertinggal setelah Kabupaten Sampang, sehingga masalah ini juga turut menyumbang turunnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada dibawah rata-rata serta memberikan dampak terhadap penekanan kasus *stunting* di Kabupaten Bangkalan. Melalui misi ke tiga RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah, maka dibutuhkan adanya inovasi yang mampu menekan persentase *stunting*. Inovasi pelayanan publik ialah hasil akhir dari organisasi publik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai penggunaanya. Salah satu inovasi pelayanan publik yang sering ditemui di Indonesia ialah inovasi pelayanan kesehatan (Asmara & Rahayu, n.d. 2019). Selama ini, inovasi dan upaya pencegahan dalam penanganan *stunting* yang telah dilakukan oleh pihak Puskesmas di Kabupaten Bangkalan, yaitu dengan mengadakan penyuluhan namun hanya sebatas pada informasi kesehatan dan bahaya *stunting* serta literasi terkait kesehatan ibu muda akan pentingnya memperhatikan status gizi selama masa pra kehamilan, kehamilan, dan *post* kelahiran selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini dirasakan belum efektif karena belum menyentuh ranah kesadaran kaitannya dengan peran, tugas dan kewajiban dalam pengasuhan anak (Fitroh & Oktavianingsih, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan peraturan negara sebagai usaha untuk merancang pengembangan kearifan lokal. Undang-Undang Desa dibentuk sebagai respon terhadap adanya suatu implementasi yang dibentuk

oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk mampu memberikan pengakuan hak asal-usul desa, subsidi, demokrasi, musyawarah dan gotong-royong (Suhartono et al., 2020). Maka dari pada itu, Pemerintah Desa sebagai pemerintahan tingkat dasar memiliki peran penting untuk mengurangi kasus *stunting*. Salah satunya dengan upaya membangun kerjasama antara pemerintah desa, bidan desa serta remaja setempat untuk membentuk suatu program yang mengarah pada penanganan *stunting*. Hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ko'olan yang terletak di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Beberapa upaya yang telah dilakukan, diantara lain yaitu dengan membentuk kader posyandu dengan cara memberikan pembekalan terkait penanganan dan pencegahan *stunting*, dengan turut melibatkan TP-PKK khususnya Pokja IV yang bertugas sebagai pengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Pemerintah desa juga turut melibatkan bidan desa yang secara umum memiliki peran penting untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan, seperti minimnya perhatian masyarakat terhadap adanya kegiatan penyuluhan posyandu dan *stunting*, karena mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang lebih memilih untuk bekerja untuk mencukupi kehidupan mereka. Sulitnya akses perjalanan dari rumah penduduk menuju lokasi penyelenggaraan posyandu yang relatif jauh, menjadi tantangan tersendiri agar program yang telah direncanakan dapat terselenggara. Dengan adanya hambatan ini, maka pemerintah desa membutuhkan adanya inovasi selain dari sosialisasi, yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman mengenai dampak *stunting*. Sehingga pada awal tahun 2017 program GOPO (Gojek Posyandu) di gagas oleh kader posyandu dengan tujuan untuk memberikan layanan antar jemput bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia yang memiliki tempat tinggal dengan jarak tempuh cukup jauh dari pos kesehatan desa, sehingga dapat mengikuti kegiatan posyandu. Pemerintah desa tentunya memiliki tanggungjawab untuk memberikan dukungan bagi para kader agar mampu melaksanakan tugas dan pelayanan secara optimal. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Ko'olan Nomor : 188/28/SK/433.315.18/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang memutuskan terbentuknya pengurus gojek posyandu di Desa Ko'olan, Kecamatan Blega, Kabupateen Bangkalan sebagai salah satu program yang diselenggarakan bersama dengan kader posyandu

dan pemerintah desa, sebagai salah satu program layanan kesehatan yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan nantinya mampu meningkatkan kehadiran masyarakat dalam kegiatan posyandu, serta mampu menekan kasus *stunting* di desa tersebut.

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran penting untuk memberikan dukungan terhadap adanya layanan gojek posyandu melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, alokasi anggaran dana desa yang di fokuskan untuk peningkatan layanan kesehatan, serta upaya pemerintah untuk menarik minat masyarakat agar lebih terbuka dengan adanya sosialisasi terkait pentingnya pemahaman terhadap pola hidup sehat dan pola asuh yang baik terhadap anak, layanan yang menunjang adanya kegiatan dalam lingkup kesehatan, sehingga mampu menekan kasus *stunting* yang ada di Desa Ko'olan. Selanjutnya, menurut Yeti dari keseluruhan peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, diantaranya :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana :

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan suatu langkah awal pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar pemerintah, sarana dan prasarana yang terpenuhi mampu memberikan pengaruh terhadap kemudahan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan.

2. Ketersediaan anggaran :

Anggaran dana menjadi suatu hal yang penting karena sumber finansial dari pemerintah merupakan suatu hal yang mampu memberikan motivasi kepada pegawai, sarana pengemban standar ukuran kinerja yang mampu dijadikan sebagai evaluasi, serta berfungsi sebagai koordinator seluruh unit kerja dalam aktivitas pemerintahan.

3. Kemitraan :

Prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga mampu menciptakan suasana pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Partisipasi dari masyarakat :

Masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki peran penting untuk mampu mengoptimalkan peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Yeti dalam Prastika, 2017).

Terbentuknya program gojek posyandu sebagai satu-satunya inovasi layanan antar jemput yang ada di

Desa Ko'olan, tentunya tidak terlepas dari adanya beberapa kekurangan serta kelemahan yang membutuhkan perbaikan agar program ini dapat terselenggara dengan baik. Kelemahan mendasar terletak pada kurangnya anggaran dana desa, sehingga para anggota harus menggunakan swadaya masyarakat untuk membiayai terlaksananya program ini agar dapat berlangsung dengan baik. Kurangnya jumlah sepeda motor sebagai moda transportasi, serta jauhnya jarak tempuh antara lokasi penjemputan anggota posyandu dengan tempat pelaksanaan kegiatan, menjadi hambatan tersendiri dalam proses penjemputan. Kelemahan selanjutnya terletak pada minimnya sumber daya manusia yang tergabung dalam gojek posyandu, sehingga kader posyandu sebagai pengelola program ini membutuhkan peranan pemerintah desa untuk mampu menggerakkan fungsi karang taruna guna memaksimalkan berjalannya program gojek posyandu. Dalam suatu organisasi khususnya dalam pemerintahan, sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting, hal ini terjadi karena sumber daya manusia menjadi penentu organisasi ataupun instansi untuk mampu memperoleh keberhasilan ataupun sebaliknya. Tingginya kompetensi sumber daya manusia di suatu organisasi mampu mempengaruhi kualitas kompetitif instansinya (Purbasari & Yuniarta, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan adanya peran pemerintah Desa Ko'olan dalam penekanan *stunting* melalui program GOPO (Gojek Posyandu) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan, yang nantinya dapat berguna untuk memperbaiki sistem dari program ini sehingga dapat dijalankan secara maksimal, serta mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam segi layanan kesehatan khususnya untuk menekan kasus *stunting*.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, menggunakan teknik *puspositive sampling* dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan dalam proses analisis data, menggunakan analisis data kualitatif melalui model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan dan penarikan kesimpulan (Anggito, Albi. & Setiawan, 2018).

Untuk mampu menggali data terkait dengan peran pemerintah dalam penanganan *stunting*, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Desa

Ko'olan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan guna mengetahui kondisi ataupun situasi yang terjadi di lapangan. Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, dilakukan bersama dengan kepala desa selaku pemangku jabatan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi berjalannya program posyandu dan GOPO. Selanjutnya, untuk memperoleh data dan informasi lebih mendalam terkait adanya peran pemerintah, maka ketua gojek posyandu dan kepala urusan bagian perencanaan desa dipilih sebagai narasumber ke dua dan ke tiga yang mampu memberikan keterangan terkait tanggungjawab pemerintah terkait dengan pembentukan gojek posyandu, serta upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang diselenggarakan bersama dengan kader posyandu selaku pengelola dan karang taruna selaku pelaksana kegiatan gojek posyandu, serta bidan desa selaku pihak yang memberikan penyuluhan terkait dengan penekanan *stunting* dan pihak yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan kepala urusan bagian perencanaan desa mampu memberikan informasi terkait perencanaan keuangan yang dialokasikan oleh kepala desa guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, pembangunan pos kesehatan desa sebagai prasarana pendukung yang mampu dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan posyandu, serta informasi terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa baik dalam segi rencana, aturan dan strategi pemerintah desa untuk menangani *stunting* yang diselenggarakan bersama dengan pihak-pihak terkait.

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperoleh data berupa surat keputusan ketua posyandu tentang peresmian gojek posyandu tanggal 2 Januari 2017, surat keputusan kepala desa tentang pembentukan pengurus gojek posyandu tanggal 29 Juni 2019, profil gojek posyandu, formulir pemantauan bulanan anak usia 0-2 tahun serta data ibu hamil bulan oktober sampai dengan desember 2020, tingkat konvergensi desa periode kuartal bulan oktober sampai dengan desember 2020, dokumentasi pos kesehatan desa yang dijadikan sebagai tempat untuk sosialisasi kesehatan oleh bidan desa bersama dengan kader posyandu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GOPO (Gojek Posyandu) merupakan suatu program yang digagas oleh kader posyandu untuk memberikan layanan antar jemput bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ko'olan Nomor: 188/28/SK/43.315.18/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pembentukan Pengurus Gojek Posyandu, maka pemerintah desa memberikan tanggungjawab kepada

karang taruna guna turut serta membantu kader posyandu dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2017 sudah terdapat 3 orang yang tergabung dalam program ini, sedangkan pada tahun 2019 setelah surat keputusan ditetapkan oleh kepala desa, tercatat sebanyak 8 orang karang taruna tergabung sebagai pengurus tetap program gojek posyandu.

Untuk mengkaji peran Peran Pemerintah Desa Ko'olan dalam penekanan *stunting* melalui program GOPO (gijek posyandu) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan, peneliti menggunakan teori Yeti dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dan peran pemerintah melalui 4 indikator yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan, partisipasi dari masyarakat (Yeti dalam Prastika, 2017). Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut :

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Pemerintah Desa Ko'olan dalam mengatasi masalah *stunting*, dapat dilihat dari adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang terlaksananya program posyandu dan gojek posyandu yang ada di desa tersebut. Sarana yang dimaksud dalam hal ini yaitu berkaitan langsung dengan diresmikannya GOPO pada tanggal 2 Januari 2017, oleh Ketua Posyandu Assyifa Ko'olan dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor: 191/08/SK/I/2017 untuk membantu kegiatan posyandu yang diselenggarakan tiga sampai empat kali pertemuan dalam 1 bulan, sehingga membutuhkan alat bantu baik berupa kendaraan ataupun alat komunikasi untuk memberikan kemudahan bagi para pengendara.

“Letak desa yang terpencil, ditambah dengan rumah penduduk yang berjauhan serta minimnya sinyal, menjadi salah satu hambatan bagi para pengendara untuk memastikan agar koordinasi antar pengurus dapat berjalan dengan baik. Sehingga untuk membantu para pengendara GOPO, maka tahun 2017 pemerintah desa memberikan bantuan berupa 3 unit HT (*Handy Talky*), sedangkan untuk sepeda motor sampai dengan saat ini sudah terdapat kurang lebih 6 unit sepeda motor milik karang taruna selaku pelaksana program GOPO, yang digunakan sebagai alat transportasi untuk antar jemput peserta posyandu” – Keterangan Bapak Abdul Latif Hidayatullah selaku Ketua GOPO pada 23 Oktober 2020.

Sedangkan untuk menunjang kegiatan posyandu agar dapat terlaksana dengan baik, maka

pemerintah desa bekerjasama dengan bidan desa serta kepala urusan perencanaan desa, guna memastikan sarana yang tersedia untuk kegiatan posyandu dapat memenuhi kebutuhan para balita, ibu hamil ataupun ibu menyusui.

“Pemerintah Desa sejauh ini sudah memberikan bantuan berupa pembelian alat imunisasi serta timbangan baik untuk bayi ataupun orang dewasa, dimana dalam hal ini selalu dikoordinasikan dengan bidan desa agar kebutuhan untuk melengkapi sarana yang menunjang mampu disesuaikan dengan anggaran yang ada” – Keterangan Bapak Hayyul Mubarak Selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa pada 12 Desember 2020.

Ketersediaan sarana saja tidak cukup untuk mampu mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan posyandu, sehingga dibutuhkan adanya prasarana yang mendukung untuk lebih memaksimalkan kegiatan ini. Oleh sebab itu, pada tahun 2016 pemerintah desa membangun pos kesehatan desa yang digunakan sebagai tempat terlaksananya kegiatan posyandu. Poskesdes terbagi menjadi tiga ruangan, yaitu ruang poli anak untuk kegiatan posyandu, ruang pemeriksaan untuk ibu hamil/ibu menyusui serta pengobatan bagi masyarakat desa, sedangkan satu ruangan yang tersisa digunakan sebagai tempat administrasi.



Gambar 1. Pos Kesehatan Desa Ko'olan

Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik, ditujukan agar masyarakat mampu memperoleh fasilitas kesehatan dengan baik, sehingga nantinya mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan program yang dibentuk agar dapat terlaksana sesuai dengan target yang ingin dicapai.

2. Ketersediaan Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan: Pasal 5 ayat 1, bahwasanya Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas yang bersifat lintas bidang. Dengan adanya dasar hukum yang ada, diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa (Mea, 2020).

Dana desa juga dianggap sebagai suatu sumber daya yang digunakan untuk memberikan sinergi terhadap adanya Pembangunan Nasional baik dalam lingkup Provinsi dan Daerah. Dana desa menjadi motivasi masyarakat desa untuk kembali atau menetap untuk membangun desa melalui program padat karya dengan memanfaatkan potensi desa dan memberdayakan kemampuan warga. Kebijakan dana desa juga mengandung nilai ekonomis dan politis. Jika dilihat dari segi ekonomis, dana desa mampu meningkatkan infrastruktur serta mendorong produktivitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh suatu desa. Sedangkan jika dilihat dari segi politis, melalui adanya dana desa secara tidak langsung mampu memacu kesadaran masyarakat akan haknya dalam ikut serta untuk meningkatkan pemerintahan serta pembangunan (Jamaluddin et al., 2018).

Selaras dengan adanya penjelasan dan aturan terkait Pengalokasian Dana Desa. Pada Tahun 2020, Anggaran Dana Desa Ko'olan di fokuskan pada dua bidang, yaitu pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Alokasi dana desa untuk bidang pendidikan di fokuskan pada pembangunan sekolah, sedangkan dalam bidang kesehatan, dana yang tersedia dialokasikan untuk kegiatan posyandu, dengan rincian dana sebanyak Rp. 18.000.000 untuk satu tahun.

“Dari anggaran dana yang ada, untuk tahun 2020 sebesar 70% anggaran pada bidang kesehatan di fokuskan untuk kegiatan posyandu, yang terbagi untuk pembelian PMT Gizi (Pemberian Makanan Tambahan), pembelian obat-obatan dan vitamin serta keperluan lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan imunisasi. sedangkan 30% dari anggaran di alokasikan untuk penanganan Covid-19 yang terbagi untuk pembelian *handsenitizer*, cairan disinfektan dan masker untuk masyarakat” – keterangan Bapak Moh. Sahuri Selaku Kepala Desa Ko'olan pada 23 Oktober 2020.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa, maka tidak ada anggaran dana yang dialokasikan secara khusus untuk program GOPO (Gojek Posyandu), sehingga biaya akomodasi yang

digunakan untuk menjamin berlangsungnya layanan ini, murni berasal dari swadaya masyarakat, dengan rincian Rp. 500.000 yang digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak. Dalam satu bulan terdapat tiga sampai dengan empat kali pertemuan, maka masing-masing relawan mengeluarkan biaya kurang lebih Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 20.000 dalam satu kali proses antar jemput anggota posyandu.

“untuk tahun 2020 anggaran hanya di fokuskan untuk kegiatan posyandu, selanjutnya pada tahun 2021 pemerintah desa sedang mengupayakan agar anggaran yang ada juga mampu ditambahkan dalam bidang kesehatan lainnya sehingga nantinya diharapkan mampu memberikan upah bagi pengurus gojek posyandu” – Keterangan Bapak Moh. Sahuri Selaku Kepala Desa Ko'olan pada 23 Oktober 2020.

Pemerintah desa perlu meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, yang dilakukan dengan cara memperbaiki sistem dan pengelolaan anggaran dana yang baik, sehingga dibutuhkan suatu reformasi untuk penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik terkait dengan anggaran dana yang masuk ataupun keluar, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, melalui akuntabilitas yang ada diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat (Arfiansyah Mufti Arief, 2020).

3. Kemitraan

Pada awal pembedakan program GOPO (Gojek Posyandu) tahun 2017, pemerintah desa dan kader posyandu memberikan tanggungjawab program ini untuk dilaksanakan oleh karang taruna, sehingga terdapat sejumlah 3 orang yang tergabung untuk melaksanakan program ini. Selanjutnya setelah program tersebut telah diresmikan melalui surat keputusan yang telah diberikan oleh Kepala Desa, maka tercatat sejumlah 8 orang tergabung menjadi pengurus tetap gojek posyandu.



Gambar 2. Pengurus GOPO dan Kader Posyandu
(Dokumentasi 2019)

Sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan, bahwasanya salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah hubungan antar organisasi. Artinya implementor pada sebuah rencana program perlu memperoleh suatu dukungan, kerjasama ataupun koordinasi antar instansi bagi keberhasilan suatu program (Jamaluddin, n.d.). Oleh sebab itu, sejak dibentuknya program gojek posyandu, maka pemerintah desa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

“sampai dengan saat ini, pemerintah desa mengajak kerjasama Ikatan Remaja Ko’olan (Ikramak) serta pemangku jabatan lainnya seperti tokoh masyarakat dan BPD (badan Pengawas Desa) yang memastikan keberadaan program GOPO mampu memberikan perubahan untuk mengurangi angka *stunting* di desa ini” – keterangan Bapak Hayyul Mubarak Hayyul Mubarak Selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa pada 12 Desember 2020.

Selain dari keterangan yang disampaikan oleh kepala urusan perencanaan desa. Tentunya kepala desa menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah kecamatan yang secara tidak langsung memiliki tanggungjawab untuk mengawasi jalannya pelayanan publik yang ada di desa, pemerintah juga bekerjasama dengan bidan desa, yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan menyediakan data terkait dengan jumlah balita, ibu hamil ataupun ibu menyusui. Sehingga data yang ada nantinya mampu dilaporkan oleh bidan desa kepada puskesmas, untuk selanjutnya mampu disampaikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan.

Tidak hanya itu saja, kepala desa juga menjalin kerjasama dengan 18 desa di Kecamatan Blega, untuk memperkenalkan program gojek posyandu sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan terhadap ibu hamil dan balita, sehingga kasus *stunting* dapat diatasi.

“Selain dengan puskesmas dan dinas kesehatan, kami juga bekerjasama dengan seluruh desa di Kecamatan Blega. Selebihnya, untuk menarik minat ibu-ibu, maka kami juga bekerjasama dengan TP-PKK untuk mampu memberikan edukasi, karena pokja IV juga memiliki fungsi yang sama dengan bidan desa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat” – Keterangan Bapak Moh. Sahuri Selaku Kepala Desa Ko’olan pada 23 Oktober 2020.

Secara umum TP-PKK khususnya pokja IV memiliki tugas penting dalam pengelolaan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Sehingga dalam pelaksanaannya, para anggota PKK mampu memberikan dukungan melalui edukasi pengelolaan makanan sehat bagi balita ataupun ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan pada saat posyandu berlangsung.

Selanjutnya, pada awal tahun 2019 program ini mampu memperoleh penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu inovasi layanan kesehatan pada saat Hari Kesehatan Nasional yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi pada saat program tersebut mulai dikenal oleh beberapa instansi pemerintah, terdapat permasalahan yang timbul karena adanya pembuatan logo dan *website* program gojek posyandu yang dibuat oleh Puskesmas Kecamatan Blega tanpa sepengetahuan pendiri program ini, sehingga menimbulkan masalah antara pendiri dengan pihak puskesmas. Walaupun demikian, akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti kepala desa, pendiri gojek posyandu, serta pihak puskesmas yang menangani pengelolaan *website* gojek posyandu.

4. Partisipasi dari Masyarakat

Partisipasi merupakan prinsip bahwa setiap orang berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi masyarakat adalah kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena keikutsertaan nya menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pengawasan terhadap eksekutif melalui badan legislatif. Partisipasi harus dibuka seluas-luasnya untuk semua lapisan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam setiap proses kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah untuk menjamin kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam memberikan partisipasi, akuntabilitas dan tepat waktu. Partisipatif juga memiliki prinsip yang sekaligus mencegah dan mencari tahu sedini mungkin kesalahan representasi dalam proses laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah (Ridwan et al., 2018).

Sebelum terbentuknya program Gokej Posyandu, ibu hamil/ibu menyusui begitupun dengan lansiamemiliki tempat tinggalnya jauh dari pos kesehatan desa, dihadapkan terhadap beberapa kendala sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh bidan desa, penyebabnya

tidak lain disebabkan oleh lokasi kondisi jalan utama yang rusak, minimnya kendaraan yang dimiliki oleh para anggota posyandu, sehingga menghambat berjalannya program yang akan dilaksanakan.



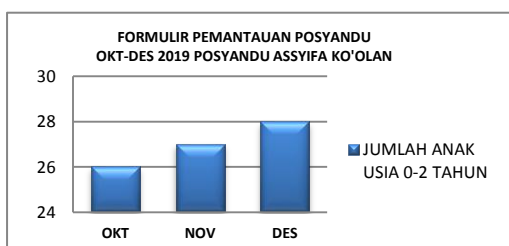
Gambar 3. Kondisi Jalan Desa Ko'olan Menuju Pos Kesehatan Desa

Banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh bidan desa yang secara khusus memiliki tanggungjawab penting untuk meningkatkan kesehatan para ibu hamil dan lansia.

“sebelum adanya program GOPO, banyak anggota posyandu yang tidak bisa hadir, karena rumah mereka cukup jauh dari poskesdes dan sebagian besar tidak memiliki kendaraan, selain itu muncul stigma masyarakat bahwa GOPO dibentuk sebagai taktik kepala desa untuk kepentingan politik. Sehingga lambat laun, pengurus mulai berupaya dan membuktikan bahwa GOPO hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan, khususnya bagi ibu hamil dan balita” – Keterangan Bapak Abdul Latif Hidayatullah selaku Ketua GOPO pada 23 Oktober 2020.

Melalui proses yang menghabiskan waktu kurang lebih 3 tahun, lambat laun program gojek posyandu mulai mendapatkan respon positif dari masyarakat, karena program ini memberikan kemudahan melalui layanan antar jemput ini anggota posyandu dan masyarakat yang memiliki tempat tinggal jauh dari poskesdes. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya data anak usia 0-2 tahun yang terdaftar pada formulir pemantauan posyandu pada akhir tahun 2019.

Tabel 2. Formulir Pemantauan Posyandu Bulan Oktober-Desember 2019



Berdasarkan rekapitulasi pemantauan pada bulan Oktober terdapat 26 anak usia 0-2 tahun yang tercatat dalam formulir posyandu, 24 anak dengan status normal, 1 anak kurang normal, dan 1 anak dengan status *stunting*. Pada Bulan November, terdapat 27 anak usia 0-2 tahun, 25 anak dengan status normal, 1 anak kurang normal, dan 1 anak memiliki status *stunting*. Selanjutnya, pada formulir pemantauan bulan Desember terdapat 28 anak usia 0-2 tahun, dengan catatan 26 anak dalam status normal, 1 anak kurang normal, dan 1 anak dengan status *stunting*. Sedangkan untuk rekapitulasi ibu hamil per bulan November sampai dengan Desember 2019, tercatat sebanyak 16 peserta, 13 orang dalam status kehamilan normal, dan 3 orang dalam status kehamilan KEK (Kurang Energi Kronik).

Dari data yang diperoleh dari kepala urusan perencanaan desa, dalam setiap kali pertemuan kegiatan posyandu masyarakat berpartisipasi untuk membayar iuran sebesar Rp. 10.000/orang sebagai pengganti obat apabila dana yang dianggarkan tidak mampu mencukupi kebutuhan posyandu.

“masyarakat secara sukarela memberikan sumbangan Rp.10.000/orang untuk membayar obat ataupun vitamin yang diberikan oleh bidan desa, untuk saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar pada tahun anggaran 2021 masyarakat dapat memperoleh pengobatan gratis”- keterangan Bapak Hayyul Mubarak Selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa pada 12 Desember 2020.

Terhitung sejak 3 bulan pertama pada tahun 2020, program pemantauan oleh Pos Kesehatan Desa tidak dapat diselenggarakan dengan optimal, hal ini terjadi karena adanya wabah *corona virus disease* (Covid-19) yang menyebar di Indonesia pada awal Maret 2020. Berdasarkan kondisi yang kurang mendukung tersebut, maka kegiatan pemantauan posyandu untuk sementara waktu dihentikan, sampai kondisi kembali seperti semula.

Guna mengoptimalkan fungsi Gojek Posyandu, maka sementara waktu program ini beralih fungsi untuk membantu pemerintah desa dalam penanganan Covid-19, baik untuk pembagian masker, edukasi pembuatan disinfektan serta pembuatan handsenitizer. Dengan demikian, program ini tidak hanya terfokus pada kegiatan posyandu saja melainkan mampu digunakan untuk kepentingan kesehatan lainnya, melalui kegiatan ini tentunya dapat menarik perhatian dan partisipasi masyarakat sehingga mampu mengelola inovasi dan kegiatan positif yang mampu dijaga dan dilaksanakan untuk kepentingan bersama.

“Setelah adanya program gojek posyandu, kami sebagai masyarakat menjadi terbantu, karena keberadaan program ini memberikan kemudahan bagi anggota posyandu yang tidak memiliki kendaraan, seperti saya dan masyarakat lain yang tempat tinggalnya jauh dari poskesdes” – Keterangan Ibu Mutiah Anggota Posyandu Desa Ko’olan pada tanggal 23 Desember 2020.

Melalui usaha dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa, diharapkan mampu meningkatkan semangat para pendiri dan pengelola gojek posyandu untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, sehingga lambat-laun mampu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan dampak positif dari adanya program gojek posyandu.

“Selama ini masyarakat hanya mampu membantu dengan memberikan dukungan saja, jika bantuan berupa tenaga mungkin hanya bisa diberikan oleh beberapa penduduk yang memiliki sepeda motor, karena sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan ada juga yang merantau, jadi ketika musim panen padi, kami dan para anggota GOPO yang memang juga sebagian besar berprofesi sebagai petani, saling membantu satu sama lain” – Keterangan Bapak H. Moh Bahri Penduduk Desa Ko’olan pada tanggal 23 Desember 2020.

Dengan adanya gotong-royong, serta banyak nya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap program ini, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi bidan desa dan kader posyandu dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil/ibu menyusui, melalui berbagai sosialisasi yang nantinya dapat diselenggarakan setiap bulan. Dengan demikian, peserta posyandu mampu mendapatkan tambahan ilmu agar lebih memperhatikan asupan gizi dan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang bayi, memahami pentingnya pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan bagi anak, serta gejala dan dampak *stunting*.

PENUTUP

Simpulan

Pemerintah desa sebagai pemerintahan tingkat dasar memiliki peran penting dalam penanganan *stunting*, upaya ini telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Ko’olan yang mampu mengoptimalkan program GOPO (Gojek Posyandu) sebagai inovasi yang digagas oleh kader posyandu. Dalam proses pelaksanaannya, gojek posyandu dilaksanakan oleh karang taruna

sejumlah 8 orang yang sudah tergabung dan terdaftar sebagai anggota tetap.

Untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam penekanan *stunting*, maka terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan. Diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Ko’olan memberikan bantuan berupa pemberian HT (*Handy Talky*) sebanyak 3 unit kepada pengurus GOPO untuk memberikan kemudahan komunikasi, pembelian alat imunisasi, PMT Gizi, timbangan dan kebutuhan lainnya dengan menggunakan dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, sedangkan dari segi prasarana pemerintah desa telah menyediakan pos kesehatan desa sebagai tempat dilaksanakannya posyandu. Dari segi anggaran, pemerintah telah menganggarkan Rp.18.000.000 untuk program posyandu yang telah dialokasikan sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak ada alokasi dana yang diberikan khusus untuk program gojek posyandu. Selanjutnya pemerintah juga perlu memperhatikan adanya faktor kemitraan dan partisipasi masyarakat, dalam hal ini pemerintah Desa Ko’olan telah membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik dari pemerintah, remaja desa ataupun para pemangku jabatan, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut nantinya mampu menarik perhatian masyarakat agar lebih terbuka terhadap sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan oleh bidan desa ataupun pemerintah setempat, agar masyarakat lebih memperhatikan pola hidup yang sehat, gejala dan dampak *stunting* dimasa yang akan datang, terutama bagi ibu hamil dan menyusui sehingga nantinya mampu lebih memperhatikan kecukupan gizi serta pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan bagi anak yang diharapkan mampu menekan angka *stunting* di Desa Ko’olan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari segi Ketersediaan Sarana dan Prasarana, pemerintah desa diharapkan mampu memperhatikan adanya kelengkapan kendaraan dalam program gojek posyandu, sehingga apabila kegiatan posyandu dilaksanakan bersamaan dengan panen padi, para pengurus tidak kewalahan untuk antar jemput peserta posyandu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran mereka untuk berupaya saling bahu-membahu mengoptimalkan program yang telah dibentuk untuk kepentingan bersama.
2. Walaupun dari segi pengelolaan anggaran dirasa cukup baik, akan tetapi pemerintah desa juga perlu melakukan pengelolaan dana agar lebih merata

3. untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga dana desa mampu diserap dengan baik untuk kebutuhan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan untuk program gojek posyandu, terutama upah bagi para anggotanya. Hal yang sama juga mampu diimplementasikan oleh pemerintah pada saat akan mengalokasikan anggaran dana desa untuk kepentingan desa yang lain, sehingga alur pengeluaran dan pemasukan mampu terdata dengan baik.
4. Kemitraan menjadi salah satu faktor yang paling penting, sehingga dalam hal ini pemerintah juga harus memperhatikan adanya sumberdaya manusia dan kaitannya dengan kemajuan teknologi untuk mendukung berkembangnya program yang sedang mereka kelola, salah satunya media sosial yang mampu dijadikan sebagai wadah untuk memperkenalkan program GOPO agar lebih dikenal oleh masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat, ikatan remaja di desa yang sadar dan terbuka dengan IT (informasi teknologi), sehingga nantinya mampu membentuk suatu *website* ataupun media sosial yang dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi kegiatan desa, informasi seputar kesehatan ataupun keterbukaan data lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini, diantaranya :

1. Tuhan Yang Maha Esa
 2. Bapak/ibu Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
 3. Galih Wahyu Pradana S.AP., M.Si. sebagai dosen pembimbing.
 4. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP dan Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP sebagai dosen penguji.
 5. Orang Tua yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat.
 6. Pemerintah Desa Ko'olan dan pendiri Gojek Posyandu yang telah bersedia untuk membantu proses pengambilan data untuk penelitian ini.
 7. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan.
- Arfiansyah Mufti Arief, V. 3. (2020). *Journal of Islamic Finance and Accounting*. 3(1).
- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas). *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*.
- Asmara, A. Y., & Rahayu, A. Y. S. (n.d.). DALAM PERSPEKTIF MATRIK INOVASI SEKTOR PUBLIK Anugerah Yuka Asmara Amy Yayuk Sri Rahayu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 57–67.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2019). *Selama Tahun 2019; Pemprov Jatim Fokus di 12 Kabupaten Tangani Masa*. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/selama-tahun-2019-pemprov-jatim-fokus-di-12-kabupaten-tangani-masalah-stunting>
- Fatonah, S., Jamil, N., & Risvianunnisa, E. (2020). *HUBUNGAN POLA ASUH IBU DALAM PEMBERIAN MAKAN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 24-59 BULAN DI PUSKESMAS LEUWIGAJAH CIMAHI SELATAN TAHUN 2019 Mahasiswi Prodi DIII Kebidanan Stikes Budi Luhur , Cimahi , Indonesia RELATIONSHIP OF PARENTING MOTHER IN TH*. 13(2), 293–300.
- Fitroh, S. F., & Oktavianingsih, E. (2020). *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Peran Parenting dalam Meningkatkan Literasi Kesehatan Ibu terhadap Stunting di Bangk*. 4(2), 610–619. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.415>
- Hastuti, P. (2018). *Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia*. 788.
- Jamaluddin, Y. (n.d.). Interaksi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Penggunaan Dana. *Ilmu Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(20217), 1–12. <http://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/2450/2007>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Mayasari, D., Indriyani, R., Ikkom, B., Kedokteran, F., Lampung, U., Kemenkes, P., Karang, T., & Lampung, B. (2018). Stunting , Faktor Resiko dan Pencegahannya Stunting , Risk Factors and Prevention. *Jurnal Agromedicine*, 5(1), 540–545.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV. Jejak (Jejak Publisher).

- Mea, J. I. (2020). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam upaya pencegahan stunting terintegrasi* (. 4(2), 1–14.
- Mindarti, L. I., & Juniar, A. P. A. (2019). INOVASI LAYANAN KESEHATAN BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi pada Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 19-27.
- Oktarina, Z., & Sudiarti, T. (2014). Faktor Risiko Stunting Pada Balita (24—59 Bulan) Di Sumatera. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 8(3), 177. <https://doi.org/10.25182/jgp.2013.8.3.177-180>
- Prastika, H. C. (2017). *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*.
- Purbasari, P. I., & Yuniarta, G. A. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana*. 11(1), 24–33.
- Rahmidini, A. (2020). 90 | *P a g e*. 90–104.
- Ridwan, M., Lubis, A. R., & Ibrahim, M. (2018). The Effect of Accountability, Transparency and Principles of Public Participation on Work Satisfaction and its Implications on Employees Performance in Aceh Employees Agency. *International Journal of Business Management and Economic Review*, 1(6), 174–182.
- Suhartono, S., Mahyani, A., Afifah, W., Sartika, D. P., & Tatamara, R. (2020). *Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Village for Budgeting Plan in Sidoarjo Regency*. 121(6), 204–209. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.042>
- Tempo.co. (2019). *Bapennas: kerugian ekonomi akibat kurang gizi bisa capai Rp. 300 T*. TEMPO.CO. <https://bisnis.tempo.co/read/1177266/bapennas-kerugian-ekonomi-akibat-kurang-gizi-bisa-capai-rp-300-t>
- Winasari, D. P., Syam, I., & Kamal, L. S. (2020). *FAKTOR HUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING DI PUSKESMAS TAMALATE KOTA MAKASSAR (Factors related to the incidence of stunting at the Tamalate health center in Makassar city)*. 2020(5), 27–34.